

BAB I

PENDAHULUAN

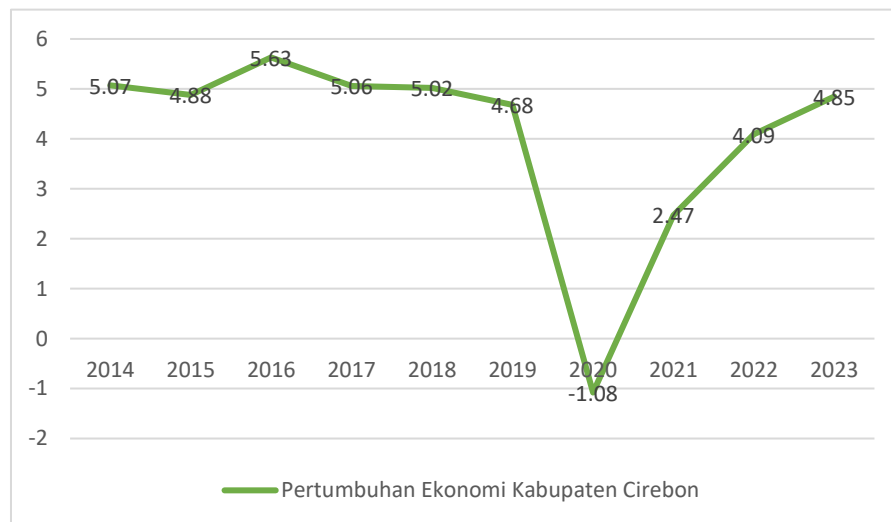
A. Latar Belakang Masalah

Transisi dari sistem pemerintahan terpusat menjadi desentralisasi memberikan kesempatan dan kebebasan untuk pemerintah daerah dalam Indonesia guna menjalankan otonomi daerah. Landasan hukum tata otonomi daerah di Indonesia tertuang dalam Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk otonomi daerah yaitu ketika pemerintah pusat melimpahkan kewenangan serta tanggung jawab pengelolaan urusan internal kepada pemerintah daerah dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah bertujuan guna mendukung peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, mengakselerasikan pembangunan, serta mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah. (Astheria, 2015).

Peningkatan dalam laju pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah mencerminkan adanya perkembangan ekonomi yang positif. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat mengalami peningkatan apabila pemerintah daerah mampu merancang dan mengarahkan program pembangunan secara tepat dan efisien (Idham et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi pada sektor perekonomian yang termanifestasi dalam pendapatan nasional yang meningkat. Kondisi ini dapat diidentifikasi melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dipergunakan sebagai parameter mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena merepresentasikan total nilai produk domestik yang dihasilkan dalam sebuah wilayah. Dinamika nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengindikasikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi (LPE)

periode berlangsung direfleksikan dengan nilai perbandingan PDRB ADHK periode berjalan terhadap periode sebelumnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dan peningkatan pada tahun 2014-2023. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (data diolah 2024).

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Tahun 2014-2023

Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi periode 2014 mencapai 5,07%, kemudian pada periode 2015 turun menjadi 4,88%. Mengalami kenaikan lagi pada periode 2016 mencapai 5,63%. Pada periode 2017 tren menurun senilai 5,06%, lalu ditahun 2018 turun menjadi 5,02%. Pada tahun 2019 masih mengalami keterlambatan 4,68% dan ditahun selanjutnya, 2020 mengalami kontraksi yang mencapai -1,08% yang disebabkan oleh kejadian pandemi. Lalu pada tahun setelahnya, 2021 ekonomi membaik dengan pertumbuhan sebesar 2,47% dan mengalami pertumbuhan yang meningkat di tahun 2022 sebesar 4,09% serta pada tahun 2023 sebesar 4,85%.

Pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) oleh pemerintah daerah bertujuan guna mewujudkan desentralisasi fiskal. Maka hal ini, pemerintah daerah mendapatkan lebih banyak kebebasan sebagai upaya

mendukung pertumbuhan ekonomi serta mengakselerasikan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya (Hastuti, 2018).

Seiring dengan kenaikan PDRB suatu daerah, potensi yang dimilikinya semakin besar. Pertumbuhan PDRB menunjukkan seberapa berhasil kebijakan yang diterapkan dalam mengakselerasikan peningkatan produksi di wilayah tersebut. Pengaturan penerimaan dan pengeluaran daerah merupakan kebijakan ekonomi yang penting (Riyadi & Woyanti, 2022).

Komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berperan utama untuk penerapan otonomi daerah yaitu pendapatan daerah. Besarnya pendapatan daerah akan memengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakannya, pendapatan daerah yang meningkat akan meningkatkan pula kapasitas daerah. Maka, dengan otonomi daerah atau desentralisasi, pengelolaan pajak dan retribusi diharapkan dikelola secara tepat oleh pemerintah daerah guna mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan yang dapat mengakselerasi proses pembangunan yaitu dengan cara peningkatan tabungan pemerintah. Tingkat tabungan pemerintah akan meningkat jika pertumbuhan penerimaan pemerintah melebihi pengeluaran (Nazrianti et al., 2021).

Pajak dan retribusi daerah merepresentasikan wujud kontribusi finansial masyarakat guna menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, yang bertujuan untuk mengakselerasikan pembangunan di tingkat wilayah. Sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD) seperti pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan pendapatan yang sah lainnya merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk mendanai program dan pembangunan daerah. Sumber utama dari pendapatan daerah yakni pajak daerah dan retribusi daerah, karena keduanya dapat sepenuhnya dirancang serta direalisasikan melalui pemerintah daerah. Pendapatan pajak dan retribusi dapat bervariasi tergantung pada potensi yang ada pada daerah masing-masing (Sunarto & Sunyoto, 2016).

Penerimaan pajak di Kabupaten Cirebon memperlihatkan pola pertumbuhan yang terus membaik setiap tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam persentase pertumbuhannya pada tahun 2014 - 2023. Pernyataan ini dapat dijelaskan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023

Tahun	Realisasi Pajak (Rp)	Presentase (%)
2014	120.405.178.674	-
2015	139.383.796.966	15,74
2016	158.183.197.394	13,51
2017	186.141.908.461	17,65
2018	207.896.011.946	11,29
2019	213.572.238.616	2,95
2020	223.610.292.769	4,86
2021	263.053.751.571	17,66
2022	308.442.409.838	17,24
2023	328.734.776.136	6,57

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (diolah 2024).

Mengacu pada tabel 1.1, tingkat penerimaan pajak daerah tahun 2014 – 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan terutama pada tahun 2020 dan 2021, di mana terjadi lonjakan sebesar 17,66%. Ini menunjukkan pemulihan pasca dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi sektor ekonomi. Meskipun ada pertumbuhan yang positif secara keseluruhan, persentase pertumbuhan mengalami fluktuasi. Seperti pada Tahun 2019 hanya mencatat pertumbuhan sebesar 2,95%, yang mungkin disebabkan oleh dampak awal dari pandemi. Dan pada tahun 2020, meskipun ada peningkatan nominal dalam penerimaan pajak menjadi 223.610,29, persentase pertumbuhannya tetap rendah di 4,86%. Tahun-tahun setelahnya (2021 dan 2022) menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan signifikan dengan persentase di atas 17%. Pada tahun 2023, meskipun masih dalam kategori positif dengan pertumbuhan sebesar 6,57%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Cirebon dari tahun 2014 - 2023 menunjukkan pola yang bervariasi, dengan beberapa tahun mengalami penurunan dan fluktuasi yang signifikan. Pernyataan ini dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2023

Tahun	Realisasi Retribusi (Rp)	Presentase (%)
2014	28.954.986.568	-
2015	33.607.908.834	16,14
2016	38.818.696.600	15,29
2017	40.173.839.689	3,49
2018	42.630.642.182	6,11
2019	42.841.103.005	0,49
2020	31.122.706.929	-27,27
2021	31.964.789.501	2,70
2022	27.897.867.887	-12,69
2023	32.401.830.073	16,16

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon (data diolah 2024).

Mengacu pada tabel 1.2, tingkat penerimaan retribusi dari tahun 2014 hingga 2016, terdapat pertumbuhan yang positif dengan persentase di atas 15% setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pemungutan retribusi berhasil pada periode tersebut. Tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dan bahkan stagnan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan hanya 0,49%. Tahun 2020 mencatat penurunan drastis sebesar -27,27%, yang disebabkan oleh dampak dari pandemi yang mempengaruhi banyak sektor perekonomian. Kemudian ditahun 2021, retribusi mulai menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 2,70%, meskipun masih di bawah angka normal sebelum pandemi. Namun, pada tahun 2022, penerimaan kembali menurun sebesar -12,69%, menunjukkan tantangan yang terus berlanjut dalam pemulihan ekonomi. Tahun 2023 menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang lebih baik dengan pertumbuhan retribusi sebesar 16,16%, menandakan

bahwa langkah-langkah yang diambil guna meningkatkan pendapatan daerah mulai membuah hasil.

Optimalisasi pendapatan daerah menggunakan instrumen pajak dan retribusi daerah menempati peran krusial guna memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Sehingga daerah dapat memperoleh sumber daya finansial yang lebih banyak untuk mengalokasikan dana pada berbagai kebutuhan pembangunan. Salah satu dampak langsungnya adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Dengan adanya peningkatan infrastruktur, pelayanan publik termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Akib et al., 2023).

Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar daerah, yang berdampak pada efisiensi distribusi barang dan jasa. Hal ini tidak hanya menurunkan biaya logistik, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah tersebut. Infrastruktur yang kuat seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan mempermudah akses bagi investor untuk membangun bisnis di suatu daerah. Dengan infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang lebih baik, kegiatan ekonomi di daerah dapat meningkat pesat. Pembangunan infrastruktur tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru di sektor-sektor ekonomi lain dalam jangka panjang (Awaliyah Matondang et al., 2024).

Beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya yang menelaah seputar pengaruh variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel pertumbuhan ekonomi daerah menyatakan temuan yang variatif serta adanya gap dalam penelitian. Seperti kajian yang dijalankan oleh Miswar et al. (2021), hasil temuan mengindikasikan bahwa variabel independen pajak daerah dan retribusi memberikan pengaruh terhadap variabel dependen

pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan temuan penelitian oleh Sulistia (2022) hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen pajak daerah dan retribusi terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi dengan presentase kontribusi mencapai 23%.

Penelitian yang menggunakan variabel dependen pendapatan daerah, dapat diamati hasil temuan oleh Rizki et al. (2021), bahwa hasil penelitian mengindikasikan variabel pajak daerah dan retribusi daerah memberi pengaruh terhadap variabel pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kontribusi mencapai 0,960 atau 96%. Berbeda dengan temuan oleh Manalu et al. (2023) bahwa hasil penelitian mengindikasikan tidak memberikan pengaruh antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar 31 %.

Hasil temuan lain tentang pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu Ningsih & Noviaty (2019), bahwa hasil temuan penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel independen pendapatan daerah terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Selatan. Hasil temuan membuktikan bahwa peningkatan pendapatan daerah juga akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan hasil temuan oleh Tuwo et al. (2021) bahwa hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh variabel independen pendapatan daerah terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa.

Sehingga, merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Pendapatan Daerah sebagai variabel Intervening di Kabupaten Cirebon”.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada pemaparan latar belakang, dapat diidentifikasi suatu permasalahan, yaitu berikut ini:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon pada periode 2020 mengalami tren penurunan dibandingkan ditahun 2019. Pada tahun tersebut Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Cirebon mencapai -1,08% (yoy), menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 4,68% (yoy).
2. Realisasi pajak daerah tahun 2023 sebesar Rp. 328.734.780.000 mengalami kenaikan Rp. 20.292.370.000 dari periode pajak yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp. 308.442,410.000.
3. Realisasi retribusi daerah Tahun 2020 mencatat penurunan drastis sebesar -27,27%, disebabkan oleh dampak awal pandemi yang mempengaruhi banyak sektor perekonomian. Kemudian ditahun 2021, retribusi mulai menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 2,70%

C. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada topik permasalahan dan menghindari luasnya permasalahan yang menyebabkan kesalahan dalam kesimpulan, maka diberlakukan pembatasan masalah bahwa luas lingkup penelitiannya hanya dilakukan pada aspek yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah sebagai variabel intervening dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

D. Rumusan Masalah

Merujuk penguraian latar belakang, peneliti memfokuskan permasalahan yang dirumuskan:

1. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
2. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?

3. Apakah terdapat pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
4. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon?
5. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon?
6. Apakah pendapatan daerah mampu memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?
7. Apakah pendapatan daerah mampu memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mencapai hal-hal berikut, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
2. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
3. Menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
4. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon.
5. Menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Cirebon.
6. Menganalisis pendapatan daerah dalam memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
7. Menganalisis pendapatan daerah dalam memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai sumber referensi

bagi para peneliti serta berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi. Selain itu, dapat juga didipergunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan mengenai pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Kajian ini dilaksanakan guna mengidentifikasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon, serta untuk mengembangkan kemampuan analisis peneliti dalam penyelesaian permasalahan ilmiah.

b. Bagi Mahasiswa Lain dan Pembaca

Kajian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi informatif terkait dengan pengaruh mediasi pendapatan daerah dalam relasi antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

c. Bagi Pemerintah

Kajian ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang bernilai guna bagi lembaga terkait, sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait dengan pendapatan daerah dan mengenai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ialah penjelasan terkait susunan penelitian yang disajikan secara umum dalam format:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait permasalahan yang akan diteliti yaitu mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang relevan dan berkaitan, hasil

temuan penelitian sebelumnya dikaji guna mengidentifikasi gambaran penelitian yang relevan dengan judul penelitian terkait guna pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai pendekatan dan jenis yang digunakan dalam penelitian, populasi, sampel, teknik yang diterapkan dalam mengumpulkan data, variabel penelitian, dan teknik untuk menguji serta menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup terkait deskripsi obyek penelitian yang diteliti, hasil uji analisis dari pengujian data yang telah diperoleh, pembahasan dan implikasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup terkait kesimpulan dari hasil pembahasan, serta saran dari hasil temuan penelitian yang telah dilakukan.

